

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Data *Literature*

NO.	JUDUL	NAMA JURNAL	KETERANGAN
1.	Analisis Kebijakan Operasional Tentang <i>Fraud Clinical Pathway</i> Pasien JKN Rawat Inap RSUD Buru Maluku	Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, p-ISSN: 2252-4134, e-ISSN 2354-8185, 2022	<p>Metode : kualitatif</p> <p>Sampel : 6 informan (Direktur RSUD, dokter, kepala ruang rawat inap, kepala tim BPJS RSUD, kepala instalasi farmasi, dan bendahara)</p> <p>Pengumpulan data : observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen</p> <p>Tempat penelitian : Maluku</p> <p>Topik penelitian : potensi <i>fraud</i> pada <i>clinical pathway</i> pasien JKN di unit pelayanan rawat inap RSUD Kabupaten Buru Provinsi Maluku</p> <p>Kekurangan : tidak dijelaskan secara rinci hasil implementasi kebijakan pengendalian <i>fraud</i></p> <p>Kelebihan : menggunakan QSPM untuk menentukan prioritas strategi pencegahan <i>fraud</i> pada <i>clinical pathway</i></p>
2.	Analisis Potensi <i>Fraud</i> di Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Moechtar Bukittinggi	Jurnal Kesehatan Andalas, p-ISSN: 2301-7406, e-ISSN 2615-1138, 2019	<p>Metode : kualitatif</p> <p>Sampel : Petugas RSUD dr Achmad Moechtar Bukittinggi yang mengetahui tentang pengendalian <i>fraud</i></p> <p>Pengumpulan data : wawancara</p> <p>Tempat penelitian : Bukittinggi</p> <p>Topik penelitian : [1] komponen input, [2] komponen proses, [3] upaya dari RSUD dr Achmad Moechtar Bukittinggi dan BPJS Kesehatan dalam pencegahan potensi <i>fraud</i></p> <p>Kekurangan : tidak dijelaskan jenis <i>fraud</i> yang terjadi di RSUD dr Achmad Moechtar Bukittinggi</p> <p>Kelebihan : pada komponen proses terbagi menjadi faktor pendorong dan penghambat <i>fraud</i></p>
3.	<i>Detection of Healthcare Fraud in The National Health Insurance Program Based on Cost Control</i>	<i>Advances in Economics, Business and Management Research</i> , e-ISSN: 1559-4122, PIMD: 35440932, 2020	<p>Metode : kualitatif</p> <p>Sampel : Petugas RSUD bagian pelayanan medis dan penjaminan</p> <p>Pengumpulan data : dokumentasi dan wawancara</p> <p>Tempat penelitian : Jawa Timur</p> <p>Topik penelitian : sistem deteksi <i>fraud</i> berdasarkan pengendalian biaya</p> <p>Kekurangan : pembahasan</p>

NO.	JUDUL	NAMA JURNAL	KETERANGAN
			algoritma deteksi kurang mendalam, Kelebihan : fokus pada kecurangan klaim INA CBGs
4.	<i>Fourteen years of manifestations and factors of health insurance fraud, 2006-2020: a scoping review</i>	<i>Health & justice</i> , p-ISSN: 2194-7899, PIMD: 34591187, 2021	Metode : <i>scoping review</i> Sampel : 67 artikel kualitatif dan kuantitatif Pengumpulan data : ACM, EconPapers, PubMed, Science Direct, Scopus, Springer, dan Web of Science Tempat penelitian : AS Topik penelitian : [1] manifestasi penipuan, [2] faktor penipuan Kekurangan : pencarian jurnal terbatas pada rentang 1 Januari 2006-31 Juli 2020 Kelebihan : menyertakan bukti relevan dari jurnal terindeks
5.	<i>Fraud and Abuse in the Saudi Healthcare System: A Triangulation Analysis.</i>	<i>Inquiry : a journal of medical care organization, provision and financing</i> , e-ISSN: 1945-7243, PIMD: 32975465, 2020	Metode : kualitatif Sampel : 5 pemimpin dari lima perusahaan asuransi kesehatan Pengumpulan data : wawancara Tempat penelitian : Arab Saudi Topik penelitian : [1] dokumen terkait <i>moral hazard</i> , [2] peraturan terkait <i>moral hazard</i> , [3] implikasi terkait <i>moral hazard</i> Kekurangan : pembahasan mengenai hubungan <i>fraud</i> dan <i>moral hazard</i> kurang mendalam Kelebihan : menyajikan data prevalensi <i>moral hazard</i> tahun 2014-2019
6.	<i>Healthcare Fraud Data Mining Methods: A Look Back and Look Ahead.</i>	<i>Perspectives in health information management</i> , e-ISSN: 1559-4122, PIMD: 35440932, 2020	Metode : kualitatif Sampel : Artikel penipuan perawatan kesehatan di Amerika Serikat Pengumpulan data : - Tempat penelitian : AS Topik penelitian : [1] deteksi penipuan berbasis aturan, [2] deteksi penipuan berbasis data, Kekurangan : tidak membahas tindakan atau proses yang terjadi di luar deteksi penipuan Kelebihan : mengulas sistem dan metode deteksi penipuan perawatan kesehatan dari literatur akademik
7.	<i>How to detect healthcare fraud? "A systematic review"</i>	<i>Gaceta sanitaria</i> , e-ISSN: 1578-1283, PIMD: 34929872,	Metode : <i>Systematic review</i> Sampel : 9 artikel metode deteksi <i>fraud</i>

NO.	JUDUL	NAMA JURNAL	KETERANGAN
		2021	<p>Pengumpulan data : <i>PubMed/Medline, Cochrane, Wiley, ScienceDirect, Google Scholar</i></p> <p>Tempat penelitian : Indonesia</p> <p>Topik penelitian : identifikasi jenis dan pelaku <i>fraud</i></p> <p>Kekurangan :peneliti tidak membahas kelemahan metode deteksi <i>fraud</i> melalui data, jenis dan aturan yang berlaku bagi pelaku <i>fraud</i></p> <p>Kelebihan : peneliti tidak hanya membahas jenis dan <i>fraud</i>, namun juga membahas mengenai metode deteksi</p>
8.	Menelusuri Potensi <i>Fraud</i> dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Rekam Medis di Rumah Sakit	<i>Jurnal Kesehatan Vokasional</i> , e-ISSN: 2599-3275, 2022	<p>Metode : kuantitatif – kualitatif</p> <p>Sampel : 87 dokumen rekam medis kaus <i>Typhoid</i> di RSU S</p> <p>Pengumpulan data : observasi dan wawancara mendalam</p> <p>Tempat penelitian : Priangan Timur</p> <p>Topik penelitian : [1] akurasi koding diagnosis, [2] telusur biaya klaim sesuai koding diagnosis, [3] pelaksanaan <i>clinical pathway</i> kasus <i>typhoid</i></p> <p>Kekurangan : peneliti hanya berfokus pada kecurangan dalam penggunaan <i>clinical pathway</i></p> <p>Kelebihan : peneliti melakukan analisis langsung dari dokumen rakam medis</p>
9.	<i>Potential for fraud of health service claims to BPJS Health at Tenriawaru Public Hospital, Bone Regency, Indonesia</i>	<i>International Journal of Innovation, Creativity and Change</i> , ISSN: 22011323, 2019	<p>Metode : kualitatif</p> <p>Sampel : 15 informan, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Petugas verifikator BPJS 2 orang – Manajemen rumah sakit 1 orang – Koder rumah sakit 1 orang – Petugas RS di ruang BPJS Center 3 orang – Perawat poli 1 orang – Pasien dipilih secara purposive 7 orang <p>Pengumpulan data : wawancara,</p>

NO.	JUDUL	NAMA JURNAL	KETERANGAN
			observasi, dan dokumentasi Tempat penelitian : Bone Topik penelitian : potensi penipuan Kekurangan : hanya mengalisis potensi <i>fraud</i> Kelebihan : lebih akurat karena didapatkan dari wawancara langsung dengan petugas
10.	<i>Potential Fraud in The Primary Healthcare</i>	<i>Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit</i> , ISSN: 20882831, 2018	Metode : kualitatif Sampel : 5 kepala puskesmas Pengumpulan data : wawancara mendalam dan observasi Tempat penelitian : Puskesmas Kabupaten X Topik penelitian : potensi <i>fraud</i> di puskesmas Kekurangan : pembahasan masih terlalu umum Kelebihan : peneliti membahas mengenai oengelolaan dana yang ada di pelayanan kesehatan primer
11.	Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (<i>Fraud</i>) Dalam Klaim Asuransi	Halu Oleo Law Review, P-ISSN: 2548-1762, E-ISSN: 2548-1754, 2020	Metode : kualitatif (hukum doktrinal) Sampel : Sumber informasi menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) Pengumpulan data : - Tempat penelitian : Indonesia Topik penelitian : [1] pengaturan hukum mnegenai penyelenggaraan asuransi di Indonesia, [2] tinjauan tentang asuransi dan klaim asuransi, [3] modus operandi tindak pidana kecurangan (<i>fraud</i>) dalam klaim asuransi, [4] kebijakan dan strategi pencegahan praktik <i>fraud</i> dalam kliam asuransi Kekurangan : tidak menjelaskan proses klaim ausransi Kelebihan : peneliti membahas dengan lengkap dan mendalam

Lampiran 2 Screenshot Hasil Pencarian Google Scholar

The screenshot shows a Google Scholar search interface. At the top, there is a search bar with the query "fraud OR penipuan perawatan kesehatan AND Klaim OR proses klaim asuransi". Below the search bar, it indicates "Sekitar 179 hasil (0,03 dtk)". The search results are listed below, with the first result being a journal article titled "Menelusuri Potensi **Fraud** dalam Jkn Melalui Rekam **Medis** di Rumah Sakit" by I. Sugianti, I. Masturoh, and F. Fadly, published in the *Jurnal Kesehatan Vokasional*. The second result is "Analisis Faktor Penyebab Kejadian **Fraud** Yang Diakibatkan Oleh Upcoding Biaya Pelayanan **Kesehatan** Kepada Bpjs **Kesehatan** Cabang Ambon" by AS Abdullah, published in the *Jurnal Kesehatan Yamasi Makassar*. The third result is a book chapter titled "HEALTHCARE **FRAUD**" by V. BAB, discussing forensic analysis of transactions. The fourth result is "ANALISIS PENCEGAHAN **FRAUD** PROVIDER JAMINAN **Kesehatan**". The bottom of the screenshot shows a Windows taskbar with various application icons.

+

le.com/scholar?start=0&q=fraud+OR+penipuan+perawatan+kesehatan+AND+Klaim+OR+proses+klaim+as

fraud OR penipuan perawatan kesehatan AND Klaim OR proses klaim asuransi

Sekitar 179 hasil (0,03 dtk)

Mungkin maksud Anda adalah: fraud OR penipuan perawatan kesehatan **DAN** Klaim OR proses klaim asuransi

Pengkodean medis

Menelusuri Potensi **Fraud** dalam Jkn Melalui Rekam **Medis** di Rumah Sakit
I. Sugianti, I. Masturoh, F. Fadly - *Jurnal Kesehatan Vokasional* - journal.ugm.ac.id
... **pengkodean** yang berbeda antara kode diagnosis berdasarkan ICD 10 dan kode untuk kepentingan **klaim** ... Terdapat banyak kasus yang lebih banyak **klaimnya** dari kasus Typhoid, ...
★ Simpan Kutip Artikel terkait

Analisis Faktor Penyebab Kejadian **Fraud** Yang Diakibatkan Oleh Upcoding Biaya Pelayanan **Kesehatan** Kepada Bpjs **Kesehatan** Cabang Ambon
AS Abdullah - *Jurnal Kesehatan Yamasi Makassar*, 2019 - jurnal.yamasi.ac.id
... menjadi perhatian dokter selama **perawatan** kepada pasien. ... bagi **proses** administrasi berkas dan **klaim** dan **proses kodifikasi** ... sekarang aplikasi e-**claim** harus menginput banyak sekali ...
★ Simpan Kutip Dirujuk 1 kali Artikel terkait

HEALTHCARE **FRAUD**
V. BAB - ... Forensik dalam Referensi Analisis Transaksi **Fraud** ... - books.google.com
... yaitu kesalahan **Pengkodean** pada permasalahan ... **klaim** dan file pelanggan, **penipuan** yang dilakukan oleh karyawan terhadap program **perawatan kesehatan** atau penyedia **asuransi** ...
☆ Simpan Kutip

ANALISIS PENCEGAHAN **FRAUD** PROVIDER JAMINAN **Kesehatan**

PubMed

OR+healthcare+fraud+AND+Claim+OR+Insurance+Claims+Processing

Library of Medicine
Technology Information

Gabung

fraud OR healthcare fraud AND Claim OR Insurance Claims Processing

Mencari

Canggih Buat peringatan Buat RSS Papan klip (4) Panduan pengguna

Menyimpan Surel Kirim ke Diurutkan berdasarkan: Pertandingan terbaik pilihan tampilan

8,807 results Page 1 of 881

UPCODING MEDICARE: IS **HEALTHCARE FRAUD** AND ABUSE INCREASING?
1 Coustasse A, Layton W, Nelson L, Walker V.
Cite Perspect Health Inf Manag. 2021 Oct 1;18(4):1f. eCollection 2021 Fall.
PMID: 34975355 [Free PMC article.](#) Review.
Share Medicare **fraud** has been the cause of up to \$60 billion in overpaid **claims** in 2015 alone. ...It was found that upcoding has had an impact on Medicare payments and **fraud**. Medicare **fraud** has been reported to be the magnitude of upcoding inpatient and outp ...
Item in Clipboard

Fraud and Abuse in the Saudi **Healthcare** System: A Triangulation Analysis.
2 Alonazi WR

ScienceDirect

?qs=Healthcare%20Fraud%20AND%20Insurance%20Claims%20Processing%20AND%20medical%20coding&show

Jurnal & Buku

Temukan artikel dengan istilah ini

Healthcare Fraud AND Insurance Claims Processing AND medical codi



☑ Pencarian lanjutan

Download selected articles [↑ Export](#)

Research article ● Open access

1 **A novel fraud detection and prevention method for healthcare claim processing using machin**

Decision Analytics Journal, 5 September 2022, ...

Anokye Acheampong Amponsah, Adebayo Felix Adekoya, Benjamin Asubam Weyori

Download PDF [Abstract](#) [Export](#)

Research article

2 **Feature engineering to detect fraud using healthcare claims data**

Expert Systems with Applications, 8 August 2022, ...

Nishamathi Kumaraswamy, Mia K. Markey, ... Karen Rascati

[Abstract](#) [Export](#)

Research article ● Open access

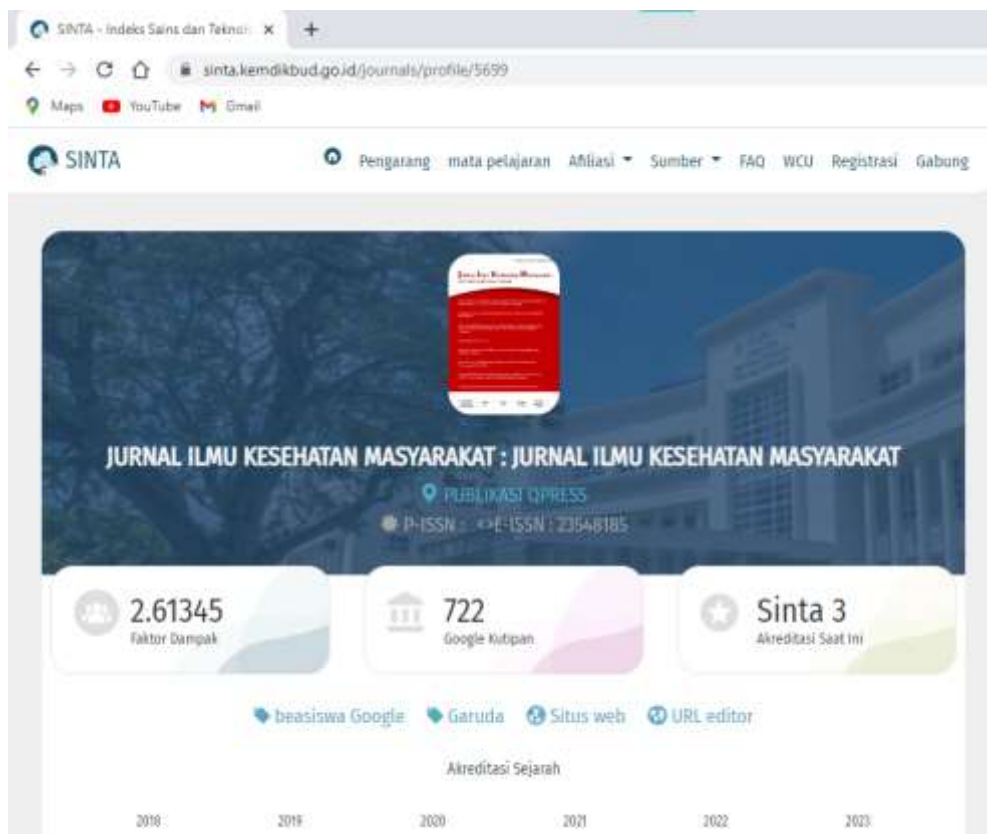
3 **How to detect healthcare fraud? "A systematic review"**

Expert Systems with Applications, 17 October 2022, ...



Lampiran 3 *Screenshot* Akreditasi SINTA

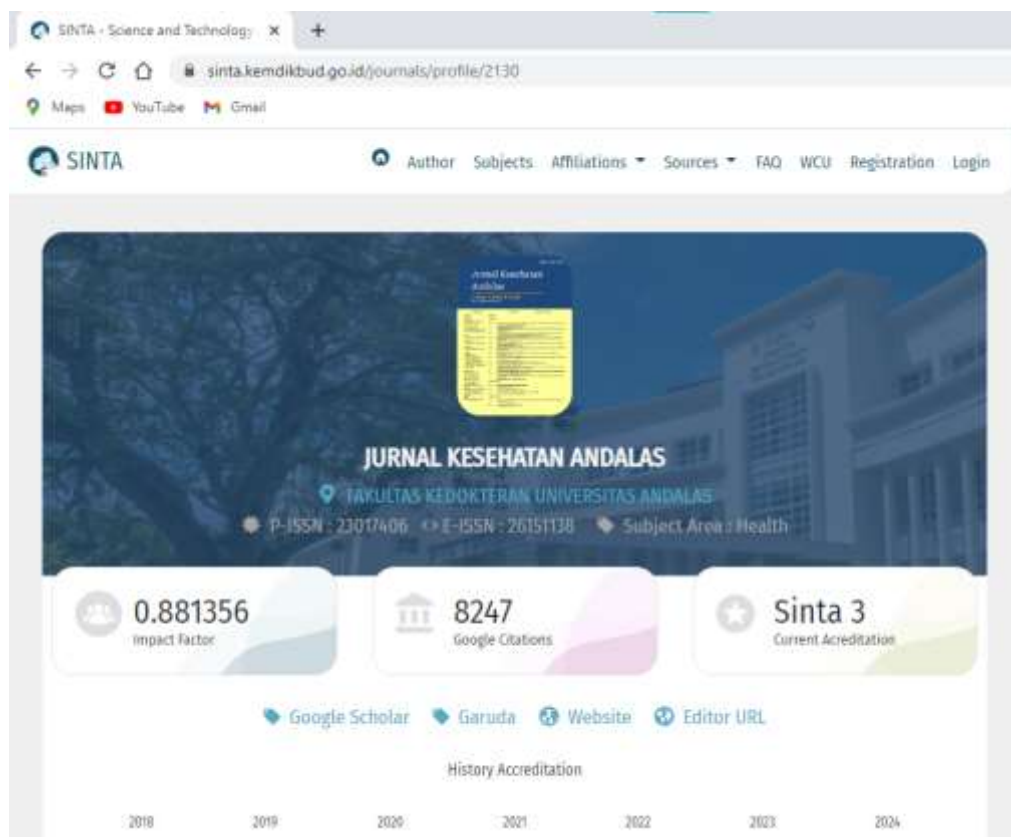
Analisis Kebijakan Operasional Tentang *Fraud Clinical Pathway* Pasien JKN Rawat Inap RSUD Buru Maluku



The screenshot shows the SINTA profile page for the journal 'JURNAL ILMU KESEHATAN MASYARAKAT'. The page displays the journal's title, publisher 'PUBLIMASTI EXPRESS', and ISSN numbers (P-ISSN: 2354-8185, E-ISSN: 2354-8185). Key performance indicators are shown in three boxes: a Factor Impact of 2.61345, 722 Google Scholar citations, and a Sinta 3 accreditation status. Below these are links for 'beasiswa Google', 'Garuda', 'Situs web', and 'URL editor'. An 'Akreditasi Sejarah' section shows a timeline from 2018 to 2023.

Tahun	Status Akreditasi
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	

Analisis Pengendalian Potensi *Fraud* di Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Moechtar Bukittinggi



The image shows a screenshot of a web browser displaying the SINTA (Science and Technology) journal profile page. The browser's address bar shows the URL: sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/2130. The page header includes the SINTA logo and navigation links: Author, Subjects, Affiliations, Sources, FAQ, WCU, Registration, and Login.

The main content area features a banner for "JURNAL KESEHATAN ANDALAS" from the "FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS". It lists the journal's ISSN information: P-ISSN: 23017406 and E-ISSN: 26151138, and its subject area: Health.

Key performance indicators are displayed in three boxes:

- Impact Factor: 0.881356
- Google Citations: 8247
- Sinta 3 Current Accreditation

Below these metrics are links for Google Scholar, Garuda, Website, and Editor URL. A "History Accreditation" section shows a timeline from 2018 to 2024.

Menelusuri Potensi *Fraud* dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Rekam Medis di Rumah Sakit

The screenshot shows the SINTA (Sistem Informasi Naskah Tesis dan Artikel) profile page for the journal 'JURNAL KESEHATAN VOKASIONAL'. The page is displayed in a web browser with the URL sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/3904. The journal is affiliated with Universitas Gadjah Mada (UGM) and is categorized under the field of Health, Science, and Education. It has a P-ISSN of 25410644 and an E-ISSN of 25993275. The journal's impact factor is 2.98413, it has 1070 citations on Google Scholar, and it holds a Sinta 2 accreditation. The page also features a navigation menu with options like 'Pengarang', 'mata pelajaran', 'Afiliasi', 'Sumber', 'FAQ', 'WCU', 'Registrasi', and 'Gabung'. At the bottom, there is a section for 'Akreditasi Sejarah' (Historical Accreditation) with a timeline from 2017 to 2024.

SINTA - Indeks Sains dan Tekno

sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/3904

Maps YouTube Gmail

SINTA Pengarang mata pelajaran Afiliasi Sumber FAQ WCU Registrasi Gabung

JURNAL KESEHATAN VOKASIONAL

UNIVERSITAS GADJAH MADA

P-ISSN : 25410644 E-ISSN : 25993275 Bidang Pelajaran : Kesehatan, Sains, Pendidikan

2.98413 Faktor Dampak

1070 Kutipan Google

Sinta 2 Akreditasi Saat Ini

beasiswa Google Garuda Situs web URL editor

Akreditasi Sejarah

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (*Fraud*) Dalam Klaim Asuransi)

SINTA - Science and Technology

sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/4685

Maps YouTube Gmail

SINTA Author Subjects Affiliations Sources FAQ WCU Registration Login

HALU OLEO LAW REVIEW

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HALU OLEO

P-ISSN : E-ISSN : 25481754

2.6 Impact Factor

235 Google Citations

Sinta 3 Current Accreditation

Google Scholar Garuda Website Editor URL

History Accreditation

2018 2019 2020 2021

Lampiran 4 Jurnal 1. Analisis Kebijakan Operasional Tentang *Fraud Clinical Pathway* Pasien JKN Rawat Inap RSUD Buru Maluku



Analisis Kebijakan Operasional Tentang *Fraud Clinical Pathway* Pasien JKN Rawat Inap RSUD Buru Maluku

Chatmah Bin Thahir^{1*}, Sobar Darmadja²

^{1,2}Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM)

Abstrak

RSUD Kabupaten Buru merupakan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dalam pelaksanaannya sering terjadi kendala dalam pelaksanaan program JKN tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan operasional tentang fraud pada Clinical Pathway pasien jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Pengambilan data dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Informan penelitian ini adalah Direktur RSUD, dokter, kepala ruang bedah, kepala tim BPJS RSUD, kepala instalasi farmasi, dan bendahara. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah potensi fraud pada clinical pathway pasien JKN yang terjadi disebabkan belum optimalnya pelaksanaan sejumlah kegiatan yaitu, ketidakpatuhan tenaga kesehatan terhadap clinical pathway di Unit Pelayanan Rawat Inap, ketidakterbukaan mengenai hasil laporan klaim, keterbatasan SDM BPJS dalam memverifikasi selisih tarif, dan tidak adanya saling koordinasi antara tim BPJS dan dokter penulis resep. Alternatif yang sebaiknya digunakan adalah strategi membuat format clinical pathway sesuai pedoman penyusunan panduan praktik klinis dan clinical pathway dalam asuhan terintegrasi sesuai standar akreditasi rumah sakit.

Kata Kunci: Clinical Pathway, Fraud, JKN, BPJS, Rumah sakit.

Abstract

Buru District Hospital is an Advanced Referral Health Facility (FKRTL) in collaboration with BPJS Kesehatan. In the implementation there are often obstacle in the implementation of the JKN program. The purpose of this study was to analyze operational policies on fraud in clinical pathways of National Health Insurance patients. This research was qualitative research with a case study approach. Data collection techniques using observation methods, in-depth interviews, document studies. Sampling using Purposive Sampling technique. Informant this research is director of rsud, doctor, head of surgery room, head of BPJS RSUD team, head of pharmaceutical installation, and treasurer. The results obtained in this study were potency fraud in JKN patient clinical pathway that have occurred due to several activities whose implementation has not been optimal, namely; non compliance of health workers with clinical pathways in inpatient service units; openness regarding the results of the claim report; BPJS HR limitations in verifying tariff differences; and the lack of mutual coordination between the BPJS team and the prescribing doctor. An alternative that should be used is the strategy to create a clinical pathway format in accordance with guidelines for developing clinical practice guidelines and clinical pathways in integrated care according to hospital accreditation standards.

Keywords: Clinical Pathway, Fraud, JKN, BPJS, Hospital.

Korespondensi*: Chatmah Bin Thahir, Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Gedung HZ Jl. Harapan No. 50, Lenteng Agung – Jakarta Selatan 12610, E-mail: chatmah1979@gmail.com, No.Telp: +6285231221225

<https://doi.org/10.33221/jikim.v11i01.984>

Received : 22 Februari 2021 / Revised : 15 Juli 2021 / Accepted : 09 Agustus 2021

Copyright © 2022, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, p-ISSN: 2252-4134, e-ISSN 2354-8185

Lampiran 5 Jurnal 2. Analisis Pengendalian Potensi *Fraud* di Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Moechtar Bukittinggi

Artikel Penelitian

Analisis Pengendalian Potensi *Fraud* di Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Moechtar Bukittinggi

Ayu Mitriza¹, Ali Akbar²

Abstrak

Sejak berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, potensi *fraud* dalam pelayanan kesehatan semakin meningkat karena adanya tekanan dari sistem pembiayaan yang baru berlaku, adanya kesempatan karena minim pengawasan, serta ada pembenaran saat melakukan tindakan *fraud*. **Tujuan:** Meneksplorasi upaya pengendalian potensi *fraud* di Rumah Sakit Dr. Achmad Moechtar Bukittinggi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain metode kualitatif. Penelitian ini dilihat dari komponen input dan komponen proses. **Hasil:** Komponen input mencakup kebijakan, tenaga dan sarana. Komponen proses mencakup faktor pendorong dan faktor penghambat potensi *fraud*. Faktor pendorong potensi *fraud* yaitu perbedaan pemahaman antara verifikasi dan dokter penanggung jawab pasien tentang diagnosis. Kesenjangan tarif riil rumah sakit dengan tarif INA CBGs. Faktor penghambat potensi *fraud* yaitu Penerapan Standar Operasional dan Clinical Pathway. **Simpulan:** Upaya dari Rumah Sakit Dr. Achmad Moechtar dalam pencegahan potensi *fraud* dengan melakukan tindakan sesuai Standar Prosedur Operasional. BPJS Kesehatan dalam pencegahan potensi *fraud* dengan meningkatkan aplikasi penyalangan potensi *fraud*.

Kata kunci: JKN, sistem pembiayaan, pencegahan potensi *fraud*

Abstract

Since the enactment of the National Health Insurance (JKN) in Indonesia, the potential for *fraud* in health services has increased due to pressure from the new system of financing, the opportunity due to minimal supervision and there is justification when doing *fraud*. **Objectives:** To explore efforts to control the potential of *fraud* at Achmad Moechtar Hospital Bukittinggi. **Methods:** This research used qualitative method design. This research was seen from input components and process components. Input components were included policies, personnel and facilities. **Results:** The process components were included the driving factors and potential inhibiting factors of *fraud*, the efforts of Achmad Moechtar Hospital and Social Health Insurance Provider (BPJS Kesehatan) in the prevention of potential *fraud*. The potential driving force of *fraud* was: difference in understanding between the verifier and the physician in charge of the patient regarding the diagnosis, the real hospital tariff gap with the tariff of INA CBGs. *Fraud* potential inhibiting factors were the Application of Operational Standard and Clinical Pathway. **Conclusions:** Efforts from Achmad Moechtar Hospital in preventing potential *fraud* by taking action in accordance with Standard Operating Procedures. Social Health Insurance Provider (BPJS Kesehatan) in the prevention of *fraud* potential by increasing *fraud* potential filtration applications.

Keywords: JKN, financing system, prevention of *fraud* potential

Afiliasi penulis: 1. BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru,
2 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
Korespondensi: Ayu Mitriza
Email: drp.ayumitriza@gmail.com Telp: 06126747420

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di tegaskan bahwa setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.¹ Kesadaran

Lampiran 6 Jurnal 3. *Detection of Healthcare Fraud in The National Health Insurance Program Based on Cost Control*



Advances in Economics, Business and Management Research, volume 163
International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 39)

Detection of Healthcare Fraud in The National Health Insurance Program Based on Cost Control

Nugroho Mardi Wibowo
Manajemen Department
Universitas Wijaya Putra
Surabaya, Indonesia
nugrohomardi@uwj.ac.id

Woro Utari
Management Department
Universitas Wijaya Putra
Surabaya, Indonesia
wurotari@uwj.ac.id

Abdul Muhith
Nursing Department
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
Surabaya, Indonesia
abdulmuhith1979@gmail.com

Yuyun Widiastuti
Management Department
Universitas Wijaya Putra
Surabaya, Indonesia
yuyunwidiastuti@uwj.ac.id

Abstract— Fraud in healthcare services has the potential to reduce the quality of health services, harming patients, and state finances. However, the implementation of fraud prevention in healthcare services has not been fully carried out. The purpose of this study is to determine the cost control-based fraud detection algorithm and detect potential healthcare services fraud in hospitals. The study was conducted at 4 hospitals in East Java - Indonesia. Data retrieval is done by the method of documentation and interviews. With interactive analysis generated, 16 cost control-based algorithms that can be used to detect fraud potential in the hospitals. Based on the time series linear regression analysis, the results show that the data groups that can show the fraud potential in the sample hospitals are (i) outpatient cases with special procedures; (ii) inpatient cases with special drugs; (iii) outpatient cases with special drugs; and (iv) inpatient cases with special prosthesis. Data groups that have not been proven to have the fraud potential are (i) a comparison of the number of JKN inpatients with the number of bills of INA-CBGs; inpatients; (ii) comparison of the number of JKN outpatients with the number of bills of outpatient INA-CBGs; (iii) disease severity level; (iv) inpatient cases bills to BPJS Health; (v) Outpatient case bills to BPJS Health; and (vi) inpatient cases with special procedures.

Keywords— Fraud; Healthcare; Hospital; Cost Control

I. INTRODUCTION

With the increase in the number of participants enrolled in the health insurance program, it will have an impact on increasing the volume of money that is very large in the healthcare industry and will lead to an increased risk of fraud activities [1]. In the United States, the Federal Bureau of Investigation (FBI) estimates that fraud in healthcare services reaches 3-10% of all bills [2]. In Indonesia, The Corruption Eradication Commission (KPK) notes that based on the BPJS Health report, up to June 2015, with only minimal supervision, 175,774 Advanced Referral Health Facility (FKRTL) have

been detected with a value of Rp. 440 billion suspected fraud [3].

Fraud in healthcare services aims to obtain unauthorized benefits from deliberate fraud. Unlike mistakes and harassment, fraudulent behavior is usually defined as a crime in law. However, there is no global consensus on the definition of fraud and abuse in healthcare services or health insurance arrangements [4].

Fraud in healthcare services can be grouped into 3 (three), namely fraud by healthcare service providers (provider fraud), patients (consumer fraud) and insurance (insurer fraud). While the party that most commits fraud is the health service provider. Based on a literature study on fraud-themed papers in healthcare, it was found that there were 69% of papers that concluded that the healthcare service provider was the party that did a lot of fraud, while 31% of the paper stated that insurance customers committed fraud [5].

To anticipate the spread of fraud in the health sector, the Government of Indonesia through the Ministry of Health issued Minister of Health Regulation No. 36 of 2015 concerning Prevention of Fraud in the Implementation of the Health Insurance Program in the National Social Security System. The development of service-oriented quality control and cost control is done through the use of evidence-based information technology and the establishment of a fraud prevention team of National Health Insurance (JKN) at the Advanced Referral Health Facility (FKRTL). The Fraud Prevention Team is tasked with detecting potential fraud through analysis of claim data. However, according to research [6] currently, the detection of potential fraud is done manually by comparing a suspected fraud with the regulations of the Ministry of Health and the Head of Health BPJS.

Payment for health services in Indonesia in the JKN program uses the INA-CBGs (Indonesia Case Base Groups) system, which is the average cost spent by a diagnosis group.

Lampiran 7 Jurnal 4. *Fourteen years of manifestations and factors of health insurance fraud, 2006-2020: a scoping review.*

Villegas-Ortega et al. *Health and Justice* (2021) 9:26
<https://doi.org/10.1186/s40352-021-00149-3>

Health and Justice

RESEARCH ARTICLE

Open Access

Fourteen years of manifestations and factors of health insurance fraud, 2006–2020: a scoping review



José Villegas-Ortega^{1,2*}, Luciana Belkido-Boza^{1,2} and David Mauricio^{1*}

Abstract

Background: Healthcare fraud entails great financial and human losses; however, there is no consensus regarding its definition, nor is there an inventory of its manifestations and factors. The objective is to identify the definition, manifestations and factors that influence health insurance fraud (HF).

Methods: A scoping review on health insurance fraud published between 2006 and 2020 was conducted in ACM, EconPapers, PubMed, ScienceDirect, Scopus, Springer and WoS.

Results: Sixty-seven studies were included, from which we identified 6 definitions, 22 manifestations (13 by the medical provider, 7 by the beneficiary and 2 by the insurance company) and 47 factors (6 macroenvironmental, 15 mesoenvironmental, 20 microenvironmental, and 6 combined) associated with health insurance fraud. We recognized the elements of fraud and its dependence on the legal framework and health coverage. From this analysis, we propose the following definition: "Health insurance fraud is an act of deception or intentional misrepresentation to obtain illegal benefits concerning the coverage provided by a health insurance company". Among the most relevant manifestations perpetrated by the provider are phantom billing, falsification of documents, and overutilization of services; the subscribers are identity fraud, misrepresentation of coverage and alteration of documents; and those perpetrated by the insurance company are false declarations of benefits and falsification of reimbursements. Of the 47 factors, 25 showed an environmental influence, including three in the macroenvironment: culture, regulations, and geography; five in the mesoenvironment: characteristics of provider, management policy, reputation, professional role and auditing; 12 in the microenvironment: sex, race, condition of insurance, language, treatments, chronic disease, future risk of disease, medications, morals, inequity, consensus; and the decisions of the claims-adjusters; and five combined factors: the relationships between beneficiary-provider, provider-insurance company, beneficiary-insurance company, managers and guilds.

Conclusions: The multifactorial nature of HF and the characteristics of its manifestations depend on its definition; identifying the influence of the factors will support subsequent attempts to combat HF.

Keywords: Healthcare, Fraud, Insurance, Behaviour, Factor, Manifestation

* Correspondence: jovillegas@unmsm.edu.pe; dr.davidmauricio@unmsm.edu.pe
 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Av. Gerardo Ancochea 251,
 15003 Lima, Peru

Full list of author information is available at the end of the article



© The Author(s). 2021 **Open Access** This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver (<http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated in a credit line to the data.

Lampiran 8 Jurnal 5. *Fraud and Abuse in the Saudi Healthcare System: A Triangulation Analysis.*

 Original Research

Fraud and Abuse in the Saudi Healthcare System: A Triangulation Analysis

Wadi B. Alonazi¹ 

InQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing
Volume 27, 1–9
© The Author(s) 2020
Article reuse guidelines:
<https://sagepub.com/journalsPermissions>
DOI: 10.1177/104898811944424
jhp.sagepub.com/home/inq



Abstract
In the insurance industry, the majority of fraud and abuse cases fall into a limited number of patterns, yet false claims normally lead to negative national, local, and organizational effects. Through monitoring the exploitative and abusive behavior commonly found in healthcare services, this paper aims to analyze initiatives implemented by governmental and related healthcare insurance agencies in Saudi Arabia to reduce moral offenses. To accomplish this objective, major governmental health insurance policy documents were analyzed at the macro-level. At the meso-level, semi-structured interviews were conducted with five health insurance professionals on measures undertaken to prevent such incidents. At the micro-level, the critical factors of fraudulent behaviors were analyzed using a retrospective analysis. Data were retrieved from anti-fraud records of ten leading health insurance companies and the focus was mainly on individuals involved in unethical practices between 2014 and 2019. After a full audit was completed, the results concluded that the Saudi healthcare system is composed of twenty-six cooperative health insurance agencies and over 5,202 health services providers. The official documents contain the details of various moral hazard measures. On annual average, more than 196 fraudulent cases were reported with a claim rejection rate of approximately 15%. The majority of fraud cases were reported in dental services with invalid card usage, followed by obstetrics-gynecology services (47 and 113 cases, respectively). Females tended to make up most deceit cases in obstetrics-gynecology with a high level of abuse [95% confidence interval: -83.398 to -24.202; $P < .003$ and -28 > 638 to -7.342; $P < .005$, respectively]. This study ultimately identifies basic measures employed at the macro-level to reduce moral hazards. However, such measures are not intended to be coherently implemented at the micro-level, especially by health insurance companies and healthcare providers.

Keywords
Measures, health insurance, fraud, abuse, Saudi Arabia

What do we already know about this topic?
Fraud and abuse are secretly practiced within the health insurance industry. Governments and other agencies are collaborating to reduce such risks.

How does your research contribute to the field?
Based on existing practices and data analyses on fraud and abuse, this study proposes a triangulation technique to enhance scrutiny and increase the effectiveness of the healthcare system.

What are your research's implications toward theory, practice, or policy?
Various approaches have concluded to date that public agencies, private insurance companies as well as major health providers are exercising their respective general guidelines to prevent fraud and abuse within the Saudi healthcare context. Applying a more integrated approach on diverse levels should ensure more effective policy in fighting falsifications.

Introduction
In healthcare management, health status is typically measured by some basic health indicators related mainly to healthcare access, effective of treatment, and quality of life.¹ Health insurance is a worldwide resource for financing healthcare systems, and any violations or misinterpretations of the processes may induce defragmentation in the population's health.^{2,3} While health policies intend to increase overall health and well-being, moral hazards (such as certain

¹Health Administration Department, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia.
Received 27 January 2020; revised 21 July 2020; revised manuscript accepted 7 August 2020.
Corresponding Author:
Wadi B. Alonazi, Health Administration Department, King Saud University, PO BOX 11587, Riyadh, 11451, Saudi Arabia.
Email: walonazi@ksu.edu.sa

 Creative Commons Non-Commercial CC BY-NC. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>) which permits non-commercial use, reproduction and distribution of the work without further permission provided the original work is attributed as specified on the SAGE and Open Access page (<https://us.sagepub.com/en-us/nam/open-access-at-sage>).

Lampiran 9 Jurnal 6. *Healthcare Fraud Data Mining Methods: A Look Back and Look Ahead.*

Vol. 19, Issue 1

Healthcare Fraud Data Mining Methods: A Look Back and Look Ahead

By Nishamathi Kumaraswamy, MS; Mia K. Markey, PhD; Tahir Ekin, PhD; Jamie C. Barner, PhD, FAACP, FAPHA; and Karen Rascati, PhD

Abstract

Healthcare fraud is an expensive, white-collar crime in the United States, and it is not a victimless crime. Costs associated with fraud are passed on to the population in the form of increased premiums or serious harm to beneficiaries. There is an intense need for digital healthcare fraud detection systems to evolve in combating this societal threat. Due to the complex, heterogenic data systems and varied health models across the US, implementing digital advancements in healthcare is difficult. The end goal of healthcare fraud detection is to provide leads to the investigators that can then be inspected more closely with the possibility of recoupments, recoveries, or referrals to the appropriate authorities or agencies. In this article, healthcare fraud detection systems and methods found in the literature are described and summarized. A tabulated list of peer-reviewed articles in this research domain listing the main objectives, conclusions, and data characteristics is provided. The potential gaps identified in the implementation of such systems to real-world healthcare data will be discussed. The authors propose several research topics to fill these gaps for future researchers in this domain.

Keywords: Medicaid, fraud detection, class imbalance, machine learning, health insurance claims

Healthcare Fraud Introduction

Background and Significance

Caring for health has become more expensive, making both private and public administrators more cost conscious in recent years. Therefore, health decision-makers are actively looking for ways to reduce costs. One such avenue of saving potentially billions of dollars is to avoid and detect healthcare fraud. The National Health Care Anti-Fraud Association¹ conservatively estimates that about 3 percent of our healthcare spending is lost to fraud (\$300 billion approximately) yearly. Fraud is a complex and difficult problem. It is important to acknowledge that fraud schemes constantly evolve, and fraudsters adapt their methods accordingly. The earliest account² of "fraud" in the healthcare literature is from the 1860s when railway collisions were a frequent occurrence, leading to a controversial condition called "railway spine," which later became a leading cause of personal injury compensation in rail accidents. These accidental events were made profitable by means of insurance settlements in-court or out-of-court by opportunistic claimants, and these events laid the groundwork for fraud definitions and fraud management in the insurance industry.

Healthcare fraud has evolved in the 21st century and has a varied set of profiles ranging from simple fraud schemes to complex networks. The twin objectives of fraud management have always been

Lampiran 10 Jurnal 7. *How to detect healthcare fraud? “A systematic review”*

L10-013-2021-00001-0001-0000

How to detect healthcare fraud? “A systematic review”

Andi Yaumul Bay R. Thaifur^{1,2,3,*}, M. Alimin Maidin¹, Andi Indahwaty Sidin¹, Amran Razak⁴¹ Department of Health Policy Administration, Faculty of Public Health, Universitas Dharma (Radenadjin, Bin-tan-50771, Indonesia)² Doctoral Program, Faculty of Public Health, University of Hasanudin, Makassar 50443, Indonesia³ Department of Hospital Management, Faculty of Public Health, University of Hasanudin, Makassar 50443, Indonesia⁴ Department of the Health Policy Administration, University of Hasanudin, Makassar 50443, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received 28 June 2021
Accepted 30 July 2021Keywords:
Fraud detection
Fraud method
Healthcare services

ABSTRACT

Objective: To identify the method used in detecting fraud cases.**Methods:** Articles searching by using logic-appropriate keywords and incorporated into search engines (data-based) journals, PubMed/Medline, Cochran, Wiley, ScienceDirect, and secondary data based Google scholar. Then data extraction is done based on inclusion criteria. The selected articles have the aim of investigating/detecting cases of fraud that have occurred in the health sector or other related sector that support the study.**Results:** The findings of the nine reviewed articles have suggested that most of the fraud perpetrators are performed by medical personnel (doctors) and providers. Many types of fraud occur such as insurance claims or medical actions that are completely unadministered or following the procedure and duplicating claims. The methods that appropriate to be used in detecting fraud are secondary data tracking, information, and technology specialist provision.**Conclusion:** Secondary data tracking is the most widely used method in fraud detection. Fraud perpetrators are ones who dominated by medical circles with fictitious claim cases. Perpetrators tend not to act themselves but in organizations with network.© 2021 SESFAS. Published by Elsevier Espana, S.L.U. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Introduction

Fraud in health care has been classified as an international challenge as well as illegal actions, where perpetrators create a zero-sum game for maintenance costs that contribute to the cumulative effect on the quality of service.^{1,2} Estimated fraud costs up to 10% of total health care expenditure worldwide.³ In the United States from 3.6 trillion dollars incurred for health care costs, billions of dollars are claims for fraud.⁴ Viewing RGA data (2017) the state of Asia Pacific that responds to fraud event data including Australia, Singapore, Malaysia, Thailand, the Philippines, Vietnam, Japan, Hong Kong, Korea, Taiwan, and Indonesia.⁵ The data indicates there are opportunities of various stakeholders in the act of fraud, not limited to state conditions both developed and developed.

Fraud is building a serious threat that disrupts the global economy with the extravagance of unnecessary or counterfeit maintenance costs and adverse health consequences, so it takes solving appropriate problems in their finishing.^{6,7} Fraud in the field of health occurs and continues to increase in South Africa.⁸ The European continent has at least 456 billion losses annually over fraud practices. However, the data is only reported from some countries in Europe, some of which deny the problems related to fraud

with privacy assumptions.⁹ Fraud issues also occur in Korea and continue to increase, reportedly at least 796.2 billion won claimed in 2018 or up 9.3% from the previous year.¹⁰

These conditions and situations have an impact on policymakers, anti-fraud, and practitioner difficulties to find reliable evidence and keep abreast of the literature review that has been published in a variety of different formats and references. Therefore, comprehensive synthesis and evaluation are critical to providing useful information and reliable evidence to decision-makers who can be gained through systematic review reviews as an efficient solution to address these issues.

Literature review

The fraud case impacts the increase in its main cost to everyone involved in the healthcare system and damages the long-term solvency of programs such as insurance services/health care plans in the underprivileged community (Medicare/Medicaid) on millions of people in the Americas (Baranok, Action, & Services, 2018).¹¹ Anti-fraud agencies have tried to detect these frauds and it is strongly suspected that they do not act on their own but have a network like an organization.^{12,13}

The review of the literature aims to review the results of published studies/reviews and gather the best evidence, then summarizes the evidence and current knowledge regarding the effects of intervention or policy from various sources.¹⁴ The review aims to collect, evaluate, and synthesize evidence from a variety of published literature reviews on fraud detection that occur in the areas of service and health insurance, to provide reliable evidence and enable researchers, policymakers, and practitioners to make

*Peer-review under responsibility of the scientific committee of the International Nursing, Health Science Students & Health-Care Professionals Conference, full-text and the cover of this journal under responsibility of authors of the article.

* Corresponding author.

E-mail address: thaifur01194@radnet.unhas.ac.id, yaumul@unhas.ac.id (A.Y.B. Thaifur).<https://doi.org/10.30103/gesta.2021.107002>©2021-0131/© 2021 SESFAS. Published by Elsevier Espana, S.L.U. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Lampiran 11 Jurnal 8. Menelusuri Potensi *Fraud* dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Rekam Medis di Rumah Sakit

Jurnal Kesehatan Vokasional, Vol. 7 No. 1 (Februari 2022)
 ISSN 2541-0944 (print), ISSN 2599-3279 (online)
 DOI <https://doi.org/10.22146/jkesvo.9008>

JKesVo
 JURNAL KESEHATAN VOKASIONAL

Menelusuri Potensi *Fraud* dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Rekam Medis di Rumah Sakit

Tracing Potential Fraud in National Health Insurance Through Medical Records in Hospitals

Ida Sugiarti^{1,2}, Imas Masturoh², Fery Fadly³

^{1,2,3}Prodi D3 RMIK Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya

ABSTRAK

Latar Belakang: Akibat *fraud*, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) harus membayar klaim lebih besar, sehingga terjadi kerugian negara. Salah satu bentuk *fraud* yang ditemukan di kelompok provider adalah *upcoding*. Data coding dan rekaman pelayanan kesehatan dalam rekam medis dapat digunakan sebagai deteksi *fraud*.

Tujuan: Menelusuri potensi *fraud* dalam rekam medis melalui telusur keakuratan kode diagnosis dan *clinical pathway*.

Metode: Pendekatan kuantitatif kualitatif, jenis penelitian *case study*, kasus *thyroid*. Subjek penelitian ditentukan dengan *purposive sampling*. Sampel penelitian kuantitatif menggunakan berkas rekam medis. Metode pengumpulan data menggunakan lembar observasi dan *in-depth interview*. Analisis data kuantitatif dengan analisis deskriptif dan Analisa data kualitatif dengan analisis konten.

Hasil: Dari 87 dokumen, ketidaktepatan kode diagnosis 31,03%, dengan persentase ketidaksesuaian tarif klaim 26,44%. Terdapat berbagai penyebab *upcoding* diantaranya karena aturan pengkodean yang berbeda antara kode diagnosis berdasarkan ICD 10 dan kode untuk kepentingan klaim yang mengacu pada peraturan dari BPJS yang dituangkan dalam Berita Acara. 91,30% ketidaksesuaian merupakan tarif klaim naik. Ketidaksesuaian *clinical pathway* paling banyak pada item tes awal dengan presentase 21,84%.

Kesimpulan: *Upcoding* tidak selalu disebut *fraud*, harus ada unsur kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan finansial. *Upcoding* dapat merubah klaim menjadi lebih tinggi. Keberadaan *clinical pathway* penting sebagai acuan tindakan pelayanan kesehatan.

Kata Kunci: *upcoding*; *clinical pathway*; *fraud*; BPJS; ICD

ABSTRACT

Background: The Health Social Security Administering Body has to pay more extensive claims due to *fraud*, resulting in state losses. One form of *fraud* found in the provider group is *upcoding*. Coding data and health records in medical records can be used as *fraud* detection.

Objective: Tracing potential *fraud* by tracing the accuracy of diagnostic codes and *clinical path* in medical records.

Methods: A qualitative-quantitative approach with a *case study*, a *thyroid* case. The research subjects were selected by *purposive sampling*. Quantitative research samples are medical records. The instrument used are observation sheet and *interview* guidelines. Data collection used observation and *in-depth interview*. Quantitative data analysis is descriptive analysis and qualitative data is content analysis.

Results: From 87 documents, the diagnosis code was 31.03% inaccurate, with a claim rate mismatch percentage of 26.44%. There are various causes of *upcoding* including the different coding rules between the diagnosis code based on ICD 10 and the code for claims purposes that refer to the regulations of the BPJS as outlined in the Minutes. 91.30% non-conformity represents an increased claim rate. The most *clinical pathway* discrepancies were in the initial test items with a percentage of 21.84%.

Conclusion: *Upcoding* is not always called *fraud*, there must be an element of intent to bring financial gain. *Upcoding* can change the claims to be higher. *Clinical pathways* are essential as a reference for health service actions.

Keywords: *upcoding*; *clinical pathway*; *fraud*; BPJS; ICD

^{1,2}Corresponding author: ida.sugiarti@dosen.poltekkestasikmalaya.ac.id

Ditujukan 11 September 2021 | Diperbaiki 14 Januari 2022 | Diterima 9 Februari 2022
<https://jurnal.agns.ac.id/jkesvo> | Published online February 28, 2021

Lampiran 12 Jurnal 9. *Potential for fraud of health service claims to BPJS Health at Tenriawaru Public Hospital, Bone Regency, Indonesia*



International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net
Volume 8, Issue 5, 2019

Potential for Fraud of Health Service Claims to BPJS Health at Tenriawaru Public Hospital, Bone Regency, Indonesia

Sukri Palotturi^{1*}, Siti Rahmawati Makkurude², Reza Arif Ahr³, Ade Suzana Eka Putri⁴, ¹Professor, School of Public Health Hasanuddin University, Makassar Indonesia, ²Graduate School of Public Health Muslim University of Indonesia, Makassar, Indonesia, ³School of Public Health Muslim University of Indonesia, Makassar, Indonesia, ⁴School of Public Health, Andalas University, Padang, Indonesia, Email: *sukripalotturi7@gmail.com, rahmawati7@gmail.com, reza.ahr@gmail.com, adesuzana@gmail.com

Background: National Health Insurance (NHI) to meet the demand for Universal Health Coverage in Indonesia is still relatively new. The potential for fraud that can harm patients and others is possible.

Objective: The aim of this study was to obtain in-depth information about the potential fraud of health care claims to the Social Security Agency of Health (BPJS) in Tenriawaru Public Hospital of Bone regency, Indonesia.

Methods: This type of research is qualitative with descriptive analysis. The technique for informant choice was purposive sampling. Data collection techniques included an interview, observation, and documentation. Data analysis was descriptive and validity of data used was achieved through a triangulation of data source.

Results: The results showed that there is a potential fraud that occurs at Tenriawaru Regional General Hospital. The fraud is caused by health care providers such as health workers and coders. There is potential fraud of 8 types: up-coding, readmissions, type of room charge, unnecessary treatment, phantom billing, keystroke mistake, service unbundling of fragmentation and cancelled service. This regulation has included elements of fraud and the types of potential fraud that occurs in primary health care and referral health.

Recommendation: The findings of this research recommend rule development to deter potential fraud perpetrators.

Key words: *Fraud, Health Service Claim, BPJS Health, Bone, Indonesia.*

Lampiran 13 Jurnal 10. *Potential Fraud in The Primary Healthcare*

JMMR (Jurnal Medicolegal dan Manajemen Rumah Sakit), 7 (3): 106-204, Desember 2018

Website: <http://jmmr.1007.ac.id/index.php/jmmr>

DOI: 10.18306/jmmr.7373

Potential Fraud in The Primary HealthcareNizar Fatharrohman*, Arlina Dewi[†]* Author Correspondent: nizar.fatharrohman@gmail.com[†] Master of Hospital Management, Postgraduate Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia**INDEXING****Keywords:**

Fraud;

Primary Healthcare;

Audit;

Human Resource;

Capitation;

ABSTRACT

This study discusses of potential fraud at the primary healthcare. Fraud is more often associated with secondary healthcare, namely hospitals, so that fraud in primary healthcare rarely supervises. From of JKN amount 38.5 trillion and estimating the potential fraud of around 9% will disburse 3.8 trillion per year. This research used qualitative methods with phenomenological design, so the data are collected using in-depth interview and observation techniques. The number of respondents in this research were 3 public healthcare and 2 private healthcare in X regency. The results showed potential fraud in primary healthcare related to human resources (HR), management of health service, leadership policies, management of capitation funds and operational audit.

Kata kunci:

Fraud;

FKTP;

Audit;

Sumber Daya Manusia;

Kapitasi;

Penelitian ini membahas potensi fraud pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Fraud lebih sering di temukan dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL) yaitu rumah sakit, sehingga fraud di FKTP jarang ada yang mengawasi. From BPJS kesehatan sebesar 38,5 triliun dan diperkirakan potensi besarnya fraud sekitar 9% maka akan hilang sekitar 3,8 triliun per tahun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi, pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Responden penelitian adalah 3 fasilitas kesehatan dan 2 fasilitas klinik swasta di kabupaten X. Hasil penelitian menunjukkan potensi fraud pada FKTP berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), manajemen pelayanan kesehatan, kebijakan kepemimpinan, pengelolaan dana kapitasi dan audit operasional.

© 2018 JMMR. All rights reserved.

Article History: Received 2018-Dec-05; Revised 2018-Dec-12; Accepted 2018-Dec-15.

INTRODUCTION

The implementation of national health insurance in Indonesia began on January 1, 2014. National health insurance was organized by Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). This health insurance aims to facilitate access to health services needed and the ease of access is also supported by the quality and quality of good service. Gradually until 2019 the entire community will be covered by a Universal Health Coverage.

Universal Health Coverage (UHC) is a concept dealing with health service reform covering all communities in terms of accessibility and equity of health services, quality and comprehensive health services that cover preventive, promotive, curative to rehabilitative services and reduce financial limitations to obtain health services for every resident.¹


One strategy for achieving UHC is by the existence of the National Social Security System (NSSN), in which there is a National Health Insurance (JKN) held using a mandatory social health insurance mechanism. National Health Insurance (JKN) is a guarantee that is used to ensure participants get the benefits of health care and protection for the fulfillment of basic health needs, which are given to

everyone who has paid contributions or fees paid by the Government. In an effort to realize the UHC organized by the BPJS, there must be a number of problems, including advocacy and JKN socialization, institutional policies, program transformation, participation, referral system, health facility infrastructure, HR, capacity building, financing, the risk of JKN Fraud, the impact of JKN on utilization, provider satisfaction and participants.²

Health care is an important factor in improving the health and well-being of every person in the world. Everyone has the right to obtain health services and the government is responsible for the availability of all forms of quality, safe, efficient and affordable health efforts by all levels of society.³

One such effort is to increase the availability and equity of basic health care facilities such as health centers in each region increasing public awareness of health, will lead to demands for improved health services. One effort to anticipate this situation is to maintain the quality of service, so that continuous efforts need to be made to find out the weaknesses and shortcomings of health services. The increasing demand of the community for the quality of health services, the function of health services needs to be improved to provide patient satisfaction. Quality of service

Lampiran 14 Jurnal 11. Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (*Fraud*) Dalam Klaim Asuransi



Halu Oleo
Law Review

Volume 4 Issue 1, March 2020, pp. 38-53. Copyright © 2020 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754.
Open Access at: <http://ojs.uhu.ac.id/index.php/halo>

Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (*Fraud*) Dalam Klaim Asuransi

Urgency of Fraud Prevention in Insurance Claims

Syukri Karniawan¹, Hari Sutra Disemadi², Ani Purwanti³

¹ Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia. E-mail: syukri.karniawan2003@gmail.com
² Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia. E-mail: harisutra1983@gmail.com
³ Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia. E-mail: ani.purwanti1978@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Prevention; Fraud; Insurance Claim</p>	<p>Insurance is a special agreement and cannot be separated from the legal field, because in an insurance claim submission by the insured can lead to an insurance, namely fraud (<i>fraud</i>), in the insurance arena known as insurance fraud. This article discusses matters relating to the pattern or model operation of fraud in insurance claims and formulates a fraud strategy policy on insurance claims. This research uses doctrinal law research. Legal informative sources use primary legal materials (relevant regulations and documents) for subsequent qualitative literary analysis. The recommendations used are illustrative, conceptual analysis and participatory in helping to solve the problem formulation. Fraud consideration policy in insurance claims needs for a conducive work environment. The parties, both the guarantor and the insured person must have the same commitment and good faith to their insurance claim process can be carried out properly. Basically, the commitment and good faith are insurance company policies which are the main key to the coverage related to insurance fraud. Fraudulent practices in insurance claims can be found because there is malicious intent or intent to obtain material benefits (a) against the law, whether done by individuals or together. This act can only be done by people who really understand the operational procedures of insurance both data and information, namely from the beginning of the guarantee process to the completion of the policy and the form of the opened and suspended policy (false guarantee).</p>
<p>INFO ARTIKEL: Kata kunci: Pencegahan; Curang; Klaim asuransi</p>	<p>ABSTRAK</p> <p>Asuransi merupakan suatu perjanjian dimana ada tidak terpisahkan dari aspek hukum, karena dalam suatu pengajuan klaim asuransi oleh tertanggung bisa menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana yaitu kecurangan (<i>Fraud</i>). Dalam dunia asuransi dikenal dengan istilah Insurance Fraud. Artikel ini membahas tentang pola atau model operasi fraud pada klaim asuransi dan merumuskan kebijakan strategi pencegahan fraud pada klaim asuransi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber informasinya adalah menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen resmi) untuk selanjutnya</p>

38